

BAB I

PENDAHULUAN

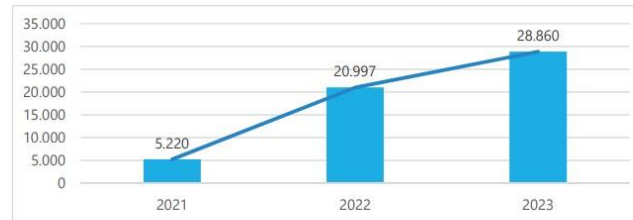
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara dengan jumlah pekerja migran terbesar di Asia. Hal ini selaras dengan catatan dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa negara Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia setelah China dan Filipina.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, seseorang dikatakan menjadi seorang pekerja migran apabila orang tersebut bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, hingga pelaut awal kapal dan pelaut perikanan.

Setiap tahunnya, jumlah pekerja migran asal Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2023), sebanyak 215.779 pekerja migran telah ditempatkan hingga September 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada September 2022, jumlah pekerja migran yang ditempatkan adalah 21.724 orang, sedangkan pada September 2023, jumlah tersebut meningkat sebesar 12% menjadi 24.412 orang.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia
periode tahun 2021, 2022, 2023 (September)



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021 (September)	6.320	
2022 (September)	21.724	▲ 244 % Kenaikan dari 2021
2023 (September)	24.412	▲ 12 % Kenaikan dari 2022

Gambar 1.1 jumlah penempatan pekerja migran Indonesia periode September 2021 – 2023
(Sumber: BP2MI, 2023)

Pekerja migran Indonesia paling banyak ditempatkan di sektor informal dengan jumlah sebanyak 13.560 orang atau 56% dari total keseluruhan. Pekerjaan yang digolongkan ke dalam sektor informal salah satunya ialah asisten rumah tangga (ART) dan *domestic worker*. Sementara itu, pekerja migran yang ditempatkan di sektor formal menyentuh angka 10.852 atau 46% dari total keseluruhan. Jenis pekerjaan pada sektor ini ialah perusahaan berbadan hukum yang memiliki kontrak kerja, seperti pekerjaan di bidang manufaktur, perikanan, kesehatan, dan sebagainya.

Mayoritas pekerja migran Indonesia ditempatkan di kawasan Asia dan Afrika, dengan jumlah mencapai 202.089 orang atau 93,6% dari total penempatan. Di kawasan Eropa dan Timur Tengah, terdapat 12.503 pekerja migran atau 5,8% dari total penempatan. Sementara itu, kawasan Amerika dan Pasifik menerima 1.187 pekerja migran, yang mewakili 0,6% dari total penempatan.

Figur pekerja migran di Indonesia sendiri didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data dari BP2MI per September 2023, perempuan merupakan

mayoritas pekerja migran, dengan jumlah mencapai 16.547 orang atau 68% dari total pekerja migran. Sebaliknya, pekerja migran laki-laki berjumlah 7.865 orang, atau 32% dari total keseluruhan. Data yang sama juga menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak diemban oleh pekerja migran pada September 2023 adalah *caregiver* dengan total 21.171 pekerja. Pekerjaan lainnya meliputi *worker* sebanyak 13.282 orang, dan house maid di peringkat ketiga dengan jumlah 5.520 pekerja. Dominasi perempuan dalam sektor ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan khusus yang mereka hadapi.

JENIS KELAMIN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	JUMLAH
Laki-Laki	10.273	11.171	9.634	5.697	9.424	7.756	9.807	10.542	7.865	82.169
Perempuan	13.742	13.618	14.634	10.665	16.554	12.632	16.772	18.446	16.547	133.610
Jumlah	24.015	24.789	24.268	16.362	25.978	20.388	26.579	28.988	24.412	215.779

Gambar 1.2 Jumlah pekerja migran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 (Sumber: BP2MI).

Data Penerbitan SIP2MI Tahun 2023 (s.d September)
Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Jabatan yang disetujui

NO	JABATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	JUMLAH
1	Caregiver	12342	9032	4927	26.838	102.388	36.042	30.701	29.016	21.171	272.457
2	Worker	4.778	4.462	4.633	27.732	57.918	17.453	14.304	15.858	13.282	166.410
3	House Maid	8.550	7.134	4.142	3.526	11.381	8.072	7.735	6.271	5.520	62.331
4	Plantation Worker	1.965	2.050	1.335	1.894	5.097	1.880	2.274	1.522	3.465	21.482
5	Housekeeper And Family Cook	1.829	1.361	442	618	1.564	1.510	2.487	2.708	2.119	14.638
6	Nursing Home	735	945	438	1.631	7.901	2.165	3.639	2.916	1.952	22.322
7	Domestic Worker	2.219	2.275	881	455	2.349	2.375	3.751	3.177	1.935	19.417
8	Domestic Helper	1.281	819	503	2.783	8.669	3.175	3.114	2.329	1.919	24.592
9	Baby Sitter (Informal)	1.255	1.162	523	436	1.322	1.200	2.146	2.333	1.563	11.939
10	Construction Worker	1.994	997	2.371	2.151	2.552	2.619	2.303	2.195	1.442	18.624
11	Elderly Caretaker	1.503	970	483	462	1.081	1.120	2.113	2.154	1.424	11.310
12	Cleaner	52	23	0	0	10	55	200	370	585	1.295
13	Operator Production	1.666	2.069	2.053	2.186	1.697	2.851	2.276	1.728	541	17.067
14	Healthcare Assistant	0	150	0	0	0	0	50	5	500	705
15	Enrolled Nurse	0	100	0	0	0	0	100	0	500	700
16	General Worker	589	225	331	64	446	1.026	595	639	482	4.397
17	Fisherman	417	376	50	780	1.301	917	865	565	429	5.700
18	Agricultural Labour	385	315	398	275	477	266	495	303	307	3.221
19	Restaurant Worker	274	51	448	72	136	239	99	110	273	1.702
20	Perawat	0	0	0	0	0	14	0	0	252	266
21	Female Cleaner	50	25	0	0	0	0	200	150	250	675
22	Cleaning Service	597	331	163	80	125	727	410	244	215	2.892
23	Other Workers Doing Simple Job Industry	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
24	Harvester	1.199	398	231	130	412	116	424	210	167	3.287
25	Factory Worker	0	160	210	0	40	2	400	0	150	962
26	Lainnya	6.914	3.182	1.822	2.469	2.844	1.552	2.838	2.937	2.056	26.614
	Jumlah	50.594	38.602	26.384	74.582	209.710	85.376	83.518	77.740	62.699	709.205

Gambar 1.3 Sebaran jabatan pekerja migran di Indonesia pada tahun 2023 (Sumber: BP2MI).

Perempuan memilih profesi sebagai pekerja migran karena pekerjaan tersebut dianggap dapat membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan yang membatasi akses dan kontrol terhadap sumber penghidupan (Solidaritas

Perempuan, 2014). Kondisi ini merupakan bagian dari feminisasi kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Banyak industri mempekerjakan perempuan pada level buruh dengan upah rendah yang sebagai buntut dari stereotip bahwa perempuan tidak sekompeten laki-laki dalam pekerjaan kasar. Upah rendah yang diterima perempuan menyebabkan marginalisasi melalui kurangnya akses optimal terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Untuk mendapatkan akses tersebut, banyak dari para perempuan yang tertarik bekerja menjadi buruh migran perempuan karena diiming-imingi kehidupan sejahtera dengan gaji besar di luar negeri. Mereka pun akhirnya memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mengungkapkan data dari tujuh organisasi masyarakat sipil di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu temuan menunjukkan bahwa terdapat 298 kasus buruh migran perempuan yang telah menikah, sementara 75 orang berstatus cerai. Data ini konsisten dengan laporan BP2MI tentang penempatan pekerja migran Indonesia per September 2023 berdasarkan status pernikahan. Mayoritas pekerja migran berstatus menikah, dengan jumlah 11.775 orang, diikuti oleh 8.732 orang yang berstatus belum menikah, dan 3.905 orang yang berstatus cerai.

Hasil survei dari Migrant CARE menegaskan bahwa mayoritas buruh migran berperan sebagai istri dan anggota keluarga mencapai 51%, sementara 85% sisanya adalah buruh migran perempuan yang sudah menjadi ibu. Data ini menggambarkan kontribusi perempuan sebagai pencari nafkah dalam struktur keluarga. Namun, kerentanan yang dihadapi buruh migran perempuan diperkuat oleh status ganda

mereka sebagai pencari nafkah dan anggota keluarga, yang mencerminkan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

MARITAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	JUMLAH
Menikah	10.971	11.555	11.665	8.008	11.926	9.210	12.681	13.758	11.775	101.550
Belum Menikah	10.537	10.396	9.434	5.974	10.471	8.415	10.158	11.170	8.732	85.288
Cerai	2.507	2.838	3.169	2.380	3.581	2.763	3.739	4.060	3.905	28.942
Jumlah	24.015	24.789	24.268	16.362	25.978	20.388	26.579	28.988	24.412	215.779

Gambar 1. 4 Data status pernikahan pekerja migran di Indonesia per September 2023. (Sumber: BP2MI).

Menurut laporan dari VOA Indonesia, Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, menyampaikan bahwa buruh migran perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Data yang disajikan oleh Migrant Care menunjukkan bahwa 5 dari 10 pekerja mengalami kekerasan seksual selama bekerja ("Darurat Kekerasan Seksual di Balik Dunia PRT Migran dan Domestik." (2021, 22 Desember). Voaindonesia.com).

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam ranah publik adalah kekerasan yang dialami oleh buruh migran perempuan di tempat kerja luar negeri dengan total aduan mencapai 6 kasus. Sementara itu, menurut Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran (2019), Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2014 mencatat sebanyak 226 kasus kekerasan terhadap buruh migran perempuan, mulai dari masa perekrutan hingga kepulangan.

Menurut Hajar (2021), segala permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan dapat disebabkan oleh sistem sosial patriarki yang dominan dalam masyarakat. Budaya patriarki secara struktural menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, sementara laki-laki mendominasi dalam posisi yang lebih

tinggi. Dampaknya adalah peminggiran atau marginalisasi perempuan dari akses ekonomi, sosial, dan politik, yang mengurangi peluang perempuan dalam pengambilan keputusan. Sistem patriarki juga menyebabkan diskriminasi dan memperberat beban perempuan secara kultural, serta mendorong praktik kekerasan terhadap mereka.

Tak hanya dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sudah melekat, konflik yang dihadapi oleh buruh migran perempuan juga disebabkan oleh berbagai hambatan yang seringkali mereka alami. Kendala tersebut tak lepas dari adanya kendala dalam komunikasi karena kurangnya pemahaman pekerja terhadap bahasa majikan, kesalahpahaman yang bisa mengarah pada penyalahgunaan oleh majikan terhadap pekerja, dan ketiadaan peraturan yang mengatur jam kerja, yang dapat mengurangi beban kerja berlebih bagi buruh migran perempuan (Rustanta, 2016).

Dari segi regulasi, konflik yang dihadapi oleh buruh migran perempuan seringkali disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum yang mengakibatkan minimnya jaminan bagi mereka, seperti yang terlihat dalam ketidakadaan payung hukum yang meminimalisasi perlindungan bagi buruh migran perempuan, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Meskipun telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pasca mengalami stagnasi selama 18 tahun, RUU PPRT masih terus menjadi perjuangan para aktivis dan pekerja rumah tangga untuk diakui sebagai sarana perlindungan yang penting bagi mereka. RUU ini dianggap sebagai sarana penting untuk memberikan jaminan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia serta melindungi pekerja migran Indonesia di sektor rumah tangga (Muliawati, 2023).

Media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi, dengan fungsi idealnya yang terdiri dari lima elemen, termasuk memberikan ruang publik untuk pemantauan kekuasaan dan representasi kaum minoritas (Kovach, Rossentiels dalam Andreas, 2010:26). Dengan demikian, perannya sangat penting dalam menyajikan peristiwa kepada masyarakat dengan cara yang akurat dan memadai, sehingga masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan realitas lapangan.

Pemberitaan media massa masih memiliki beberapa catatan dalam konteks liputan mengenai buruh migran perempuan. Hal ini dicerminkan dari bagaimana media masih sering kali memproduksi berita yang tidak mencerminkan realitas sebenarnya dalam kehidupan masyarakat (Rustanta, 2021:5).

Tabel 1.1 Jumlah pemberitaan buruh migran perempuan di lima media online yang paling banyak dikonsumsi masyarakat menurut Similarweb.com tahun 2023

No.	Media	Total
1.	Detik.com	46 berita
2.	Kompas.com	32 berita
3.	CNN	10 berita
4.	Tribunnews	37 berita

(Sumber: Data Primer Peneliti).

Data dalam tabel tersebut menunjukkan frekuensi liputan mengenai buruh migran perempuan oleh empat media online terkemuka di Indonesia mengacu pada laporan Digital News Report 2022 oleh Reuters Institute. Hasilnya menunjukkan bahwa media online Indonesia cukup aktif dalam meliput berbagai isu yang

berkaitan dengan buruh migran perempuan, termasuk kekerasan fisik oleh majikan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pelanggaran prosedur keberangkatan.

Isu-isu yang dialami buruh migran perempuan memerlukan upaya media untuk mengakomodasi permasalahan tersebut sebagai pihak yang memiliki peran signifikan dalam menetapkan agenda sosial dan politik menjadi isu krusial yang membutuhkan pemusatan perhatian dari masyarakat (Rosdalina & Kartika, 1999 dalam Yayasan Bakti, 2017).

Media perlu mengimplementasikan upaya tersebut dengan menyediakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan untuk memperbaiki representasi perempuan dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk menjadi tokoh yang positif, menggunakan narasumber yang tepat, dan memperhatikan sensitivitas gender dalam informasi yang disajikan. Namun, sebagian aktivis perempuan dan akademisi yang berfokus pada media dan feminisme masih mengkritik bahwa media online belum secara optimal melaporkan isu-isu perempuan, terutama karena penekanan pada model jurnalisme objektif (Yayasan Bakti, 2017). Namun, sejumlah kalangan dari aktivis perempuan hingga akademisi yang berfokus pada media dan feminisme kerap melihat bahwa media-media *online* belum memberitakan isu terkait perempuan secara optimal yang disebabkan oleh penerapan model jurnalisme objektif.

Jurnalisme objektif adalah cara penyajian berita yang bertujuan untuk memberikan informasi dengan adil dan tidak memihak. Dalam jurnalisme objektif, wartawan berusaha untuk menyajikan fakta tanpa memasukkan opini pribadi, bias,

atau interpretasi subjektif. Tujuannya adalah menyajikan berita sehingga pembaca atau penonton dapat membentuk opini sendiri berdasarkan fakta yang diberikan. Westerstahl (1983) menekankan bahwa faktualitas dan imparsialitas merupakan aspek penting dalam jurnalisme objektif.

Penerapan jurnalisme objektif sering kali menyebabkan penyampaian pandangan suatu masalah menjadi luput karena praktik tersebut lebih memprioritaskan nilai-nilai yang objektif untuk menjaga independensi, daripada menunjukkan sikap keberpihakan. Terutama dalam pemberitaan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan kelompok-kelompok marginal, media sering kali hanya menghadirkan perspektif dari narasumber yang didominasi oleh pandangan maskulin.

Byerly dan Ross (2006) memandang bahwa banyak media yang cenderung menyajikan penggambaran objektif melalui sudut pandang laki-laki yang dapat berpotensi memberikan berdampak negatif pada perempuan sebab perempuan menjadi tidak direpresentasikan dengan sempurna pada pemberitaan. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali tak terwakili secara proporsional dalam liputan media.

Naomi Wolf (2013), dalam karyanya "Fire with Fire", mengungkapkan bahwa media massa dapat memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan melalui apa yang disebutnya sebagai "*apartheid gender*". *Apartheid gender* terjadi ketika proses seleksi, penafsiran, dan penyajian informasi oleh media mampu menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan.

Pemberitaan tentang buruh migran perempuan, yang sering kali menyoroti isu-isu seperti TPPO, kekerasan, penipuan, dan sebagainya, dapat mengakibatkan praktik apartheid gender jika media massa tidak memberikan liputan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kode etik yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk memainkan peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan, termasuk dalam konteks buruh migran perempuan, melalui penekanan pada perspektif gender dalam pelaporan berita. Dengan demikian, konsep jurnalisme dengan perspektif gender menjadi relevan dan penting bagi media dalam menyajikan informasi terkait buruh migran perempuan.

Luputnya pengimplementasian indikator jurnalisme perspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan dapat memperkuat ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal buruh migran perempuan, kemungkinan besar narasi yang bias gender telah menjadi hal umum dalam media massa. Akibatnya, perempuan tidak diwakili secara proporsional di berbagai sektor media, termasuk industri hiburan dan industri berita (Rustanta, 2016).

Salah satu indikator dalam jurnalisme perspektif gender menitikberatkan pada penggunaan diksi dalam pemberitaan. Panduan liputan berperspektif gender dari Yayasan Bakti (2017) menyarankan beberapa penggunaan kata-kata yang disarankan dan tidak disarankan. Dalam konteks liputan mengenai buruh migran perempuan, masih banyak penggunaan kata-kata yang tidak disarankan, seperti PSK, janda, pekerja malam, dan sebagainya, yang masih umum digunakan oleh media massa.

Menurut penelitian Sarwono (2011) tentang analisis framing pemberitaan mengenai kekerasan terhadap buruh migran perempuan di beberapa media, seperti Kompas, Media Indonesia, dan Republika, disimpulkan bahwa media masih menunjukkan sikap pesimis terhadap respons pemerintah terhadap kasus buruh migran perempuan. Selain itu, terdapat ketidakproporsionalan dalam penggunaan narasumber perempuan, yang cenderung lebih minim daripada narasumber laki-laki. Hal ini menandakan kurangnya representasi dan dukungan media terhadap buruh migran perempuan. Narasumber laki-laki juga cenderung berfokus pada bidang sekunder seperti politik, hukum, dan ekonomi, sementara narasumber perempuan lebih fokus pada upaya penyelamatan dan perlindungan buruh migran perempuan. Secara keseluruhan, penelitian tersebut menemukan bahwa media cenderung mendramatisir liputan mengenai buruh migran perempuan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam menggalakkan implementasi jurnalisme perspektif gender dalam produksi berita untuk memastikan pemberitaan lebih inklusif dan progresif terhadap perempuan sebagai buruh migran.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa media masih menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai buruh migran. Ini tercermin dari narasi pemberitaan yang cenderung mengandung bias gender, dramatisasi yang berlebihan terhadap perempuan, serta dominasi narasumber laki-laki dalam setiap liputan.

J. D'Heer et al., (2019) meninjau riset-riset terdahulu yang menyatakan bahwa aktor perempuan yang merepresentasikan isu tertentu dalam pemberitaan sering kali diremehkan atau distereotipkan. Pertama, laki-laki mendominasi ruang diskusi terkait dengan pemberitaan di media massa karena dipercaya sebagai sosok yang

lebih informatif dan otoriter, sementara perempuan lebih diposisikan pada sudut pandang personal, seperti menjadi saksi mata atau voxpop. Kemudian, perempuan kerap kali digambarkan secara tidak proporsional dalam peran keluarga, seperti ibu rumah tangga, sementara laki-laki digambarkan pada profesi yang lebih kompleks, seperti pebisnis atau ahli hukum. Perempuan juga sering kali difokuskan pada hal yang personal, seperti umur, status pernikahan, dan aspek lain yang dapat berujung pada stigmatisasi.

Sejatinya, buruh migran perempuan memiliki diversifikasi representasi dalam pemberitaan di media massa. UN Women (2017) mengklasifikasikan representasi buruh migran perempuan pada pemberitaan menjadi tiga, yakni buruh migran sebagai pahlawan, ancaman, serta korban. Sering kali identifikasi buruh migran perempuan pada kategori tersebut ditandai dengan adanya sensasionalisme, stereotip gender, serta distorsi yang dapat berdampak negatif terhadap strategi mitigasi (Brennan, 2005). Pengidentifikasian buruh migran perempuan sebagai pahlawan juga memiliki tendensi adanya pengabaian hak asasi manusia dan perempuan serta dampak sosial terkait dengan keuangan sehingga mengabaikan kerentanan mereka dalam hal lain.

Dari hal tersebut, pemahaman masyarakat terkait buruh migran perempuan menjadi tanggung jawab media melalui pemberian informasi untuk dapat membentuk opini publik yang dapat berpengaruh pada kebijakan suatu negara dalam memberikan hak dan perlindungan kepada kelompok buruh migran perempuan. Untuk memerangi adanya diskriminasi dan pembentukan stereotip pada buruh migran perempuan, peran media dalam menyusun narasi dan wacana

yang lebih responsif terhadap gender dibutuhkan dalam praktik peliputan terkait buruh migran perempuan melalui implementasi jurnalisme perspektif gender.

Secara kuantitatif, berbagai media *online* telah meliput isu buruh migran perempuan dengan jumlah yang tidak sedikit dengan isu yang beragam mulai dari TPPO, kekerasan, penipuan, deportasi, dan lainnya. Meskipun demikian, isu perempuan dan pekerja migran belum menjadi isu primadona yang diangkat oleh media (Jaring, 2019). Padahal, kasus tidak menyenangkan kerap mengiringi perjalanan mereka selama menjadi buruh migran perempuan. Perempuan, buruh migran, hingga buruh migran perempuan sekalipun tak jarang direpresentasikan secara negatif oleh media sebab media memiliki tendensi untuk meliput berita yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif (Utami, 2022).

Dilansir dari Jaring.id dalam tulisannya bertajuk “Peran Jurnalis Perempuan Minim dalam Keredaksian Media”, isu perempuan yang termarginalkan dari pemberitaan kerap membuat pemerintah dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti langkah dan sikap yang harus diambil ketika terjadi hal tidak menyenangkan yang menimpa perempuan. Hal tersebut terjadi karena media belum menempatkan isu buruh migran perempuan sebagai prioritas. Masih banyak media yang hanya mengangkat kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan substansinya pada konteks isu perempuan. Dengan demikian, media massa digadang-gadang dapat mempublikasikan persoalan buruh migran perempuan untuk mengubah pandangan publik dan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan dan kebijakan yang ramah terhadap perempuan, khususnya yang bekerja sebagai buruh migran.

Cerita Lengkap TKW Cianjur Pergi ke Dubai hingga Dijebak Jadi PSK

Bima Bagaskara - *detikJabar*

Gambar 1. 5 Artikel buruh migran perempuan di media online Detik.com

Berita tersebut menyajikan informasi soal seorang perempuan dari Kabupaten Cianjur yang merupakan seorang korban TPPO serta dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Dubai akibat dijemput oleh sang teman. Kasus ini mencuat setelah dua anak kandung korban membuat video permintaan tolong kepada Kapolri untuk mengusut kasus sang ibu. Adapun hal menarik yang penulis amati dari pemberitaan tersebut adalah terkait dengan dominasi narasumber laki-laki yang ada pada berita serta nihilnya informasi dari dua pihak antara pihak yang mewakili korban dan pelaku. Selain itu, penggunaan kata PSK juga bukan menjadi diksi yang disarankan dalam peliputan yang sensitif gender jika mengacu pada etika jurnalisme perspektif gender.

Berita Regional

Terlibat TPPO, Perempuan Semarang Rayu 15 Pekerja Migran Ilegal Jadi Pemetik Buah Bergaji Tinggi

Gambar 1. 6 Artikel buruh migran perempuan di media online Tribunnews

Berita di atas merupakan berita terkait buruh migran perempuan dari media *online* Tribunnews dan Kompas.com yang memiliki kesamaan pembahasan, yakni isu penipuan buruh migran perempuan yang linear dengan isu TPPO.

Berita pertama dari Tribunnews menyajikan informasi terkait dengan TPPO yang didalangi oleh sepasang suami istri. Hal ini dituliskan dalam kalimat:

“...Tindak kejahatan itu juga dibantu suaminya yang berada di Selandia Baru untuk memudahkan aksinya.

Suami istri itu bekerja sama untuk mendatangkan pekerja migran dari Indonesia untuk dipekerjakan di New Zealand.”

Namun, penulis melihat bahwa penggunaan diksi “Perempuan Semarang” dalam judul berita seolah ‘menunjuk’ bahwa perempuan tersebut merupakan pelaku tunggal dalam aksi TPPO tersebut, padahal perempuan tersebut juga memiliki kaki-tangan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan bias gender dalam pemberitaan buruh migran perempuan.

The image shows a vertical list of four news snippets. Each snippet includes a logo for the media outlet, a headline, a short summary, and a date. To the right of each headline is a small, square portrait of a woman, likely the subject of the article.

- Merdeka.com**: Headline: "Kisah Pilu TKW Lombok, Dijanjikan Bekerja ke Turki Malah ke Libya & Dianiaya Majikan". Summary: "Dalam video yang beredar di media sosial, pekerja asal Lombok Timur itu mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Turki,...". Date: 16 Jun 2023.
- SINDOnews Daerah**: Headline: "Kisah Pilu TKW Indramayu Hilang 16 Tahun Muncul Minta Tolong Presiden Jokowi". Summary: "Nasib pilu kembali dialami pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Indramayu.". Date: 28 Oct 2023.
- iNews.ID**: Headline: "Viral Kisah Pilu Ibu Kerja 40 Tahun Jadi TKW di Malaysia, Harta Habis Dijual Anak Kini Dijemput Panti Jompo". Summary: "Kisah pilu menimpa seorang ibu yang telah bekerja 40 tahun di Malaysia namun hartanya habis dijual anaknya viral di media sosial.". Date: 14 Dec 2023.
- Tribunnewswiki.com**: Headline: "KISAH Pilu Giarti, Sosok TKW Tulungagung yang Uangnya Ditilak, Ditenggang, Dikeberkani 10 Tahun Hilang". Summary: (partially cut off). Date: (partially cut off).

Gambar 1. 7 Pemberitaan Buruh Migran Perempuan di sejumlah media dengan penggunaan diksi “Kisah Pilu” sebagai judul

Kompas.com / Regional

Kisah Pilu TKW Asal Indramayu, 7 Tahun Hilang Kabar Ternyata Tak Boleh Keluar Rumah dan Gaji Belum Dibayar Majikan

Gambar 1. 8 Pemberitaan Buruh Migran Perempuan di sejumlah media dengan penggunaan diksi "Kisah Pilu" sebagai judul

Banyak media *online* yang menyorot soal bagaimana buruh migran perempuan kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pemberi kerja, seperti adanya tindak kekerasan hingga eksploitasi. Dari gambar di atas, tidak sedikit media *online* yang menggunakan diksi "kisah pilu" sebagai pemilihan judul pada pemberitaan buruh migran perempuan. Penggunaan frasa tersebut menjadi salah satu bentuk eksploitasi perempuan dalam praktik media agar membuat pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca berita tersebut karena menimbulkan simpati belaka dalam keadaan buruh migran perempuan (Putri, Dianastiti, & Sumarlam, 2023).

Pada dasarnya, media *online* masih memiliki pelbagai catatan dalam memberitakan isu terkait buruh migran perempuan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas media *online* dalam pemberitaan terkait buruh migran perempuan, penulis tertarik untuk melihat hal tersebut dengan menggunakan konsep jurnalisme perspektif gender.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah pekerja migran di Indonesia terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya dengan mayoritas di antaranya adalah perempuan. Perempuan sebagai buruh migran seringkali menghadapi berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan

seksual, serta eksploitasi dan perdagangan orang. Kondisi ini terkait erat dengan feminisasi kemiskinan yang mendorong perempuan untuk memilih menjadi buruh migran sebagai jalan keluar dari kemiskinan sebagai akar dari terbatasnya akses mereka terhadap keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik.

Merespons hal tersebut, media massa seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi rentan buruh migran perempuan ini, mendukung mereka untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan di tempat kerja luar negeri. Namun, ada kecenderungan bahwa media massa di Indonesia belum sepenuhnya meliput isu buruh migran perempuan dengan perspektif gender. Dari penelitian terdahulu, media *online* masih belum menempatkan mereka sebagai subjek utama dan kurang melibatkan perempuan sebagai narasumber utama. Selain itu, media cenderung mengekspos penderitaan mereka tanpa mengikuti proses advokasi dan perlindungan yang dibutuhkan. Penggunaan kata-kata dalam liputan seringkali memanfaatkan diksi yang mencari simpati publik, tidak sesuai dengan prinsip jurnalisme perspektif gender, bahkan judul-judul berita kadang menempatkan perempuan sebagai pelaku tunggal dalam isu penipuan buruh migran perempuan. Hal ini bisa diminimalisir dengan menerapkan jurnalisme perspektif gender dalam liputan mereka. Namun, beberapa praktisi media menilai bahwa isu buruh migran perempuan masih belum menjadi perhatian utama dalam redaksi media, terutama karena dominasi pandangan maskulin dari jurnalis laki-laki di ruang berita. Implementasi jurnalisme perspektif gender di dalam liputan tentang buruh migran perempuan bisa membantu mereka melawan sistem patriarki yang

telah membawa mereka mengalami berbagai kesulitan selama menjadi buruh migran.

Berdasarkan kasus dan data yang telah disebutkan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana media *online* mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender terhadap pemberitaan buruh migran perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah adalah: mengetahui bagaimana media *online* mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender terhadap pemberitaan buruh migran perempuan yang akan diukur dengan cara melihat proporsi pemberitaan yang menggunakan diksi sensasional, proporsi pemberitaan yang memenuhi kode etik jurnalistik, proporsi perempuan dan laki sebagai sumber pemberitaan yang dikutip, serta proporsi diksi dalam pemberitaan yang berperspektif terhadap gender melalui proses coding dengan pengukuran validitas data menggunakan uji reliabilitas.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memiliki signifikansi karena akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang studi tentang buruh migran perempuan dan jurnalisme perspektif gender. Dengan menganalisis bagaimana media massa meliput isu buruh migran perempuan menggunakan prinsip jurnalisme perspektif gender, penelitian ini dapat membantu memperdalam

pemahaman tentang konsep-konsep teoritis, seperti peran media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap buruh migran perempuan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam memberikan panduan dan rekomendasi bagi praktisi media, organisasi non-pemerintah (NGO), pemerintah, dan masyarakat umum dalam meningkatkan liputan media mengenai buruh migran perempuan. Dengan memahami bagaimana media dapat meliput isu tersebut secara lebih inklusif dan sensitif terhadap gender, praktisi media dapat meningkatkan kualitas liputan mereka untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan mendukung upaya advokasi dan perlindungan bagi buruh migran perempuan. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dan NGO untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan buruh migran perempuan.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Secara sosial, penelitian ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak buruh migran perempuan. Dengan menyoroti ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam liputan media, penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis kepada masyarakat tentang bagaimana media memengaruhi persepsi dan sikap terhadap buruh migran perempuan. Hal ini dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam mendukung perlindungan hak-hak buruh migran perempuan, mengurangi stigma, dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat secara keseluruhan.

1.5 Kerangka Teoretis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik. Paradigma ini melihat realitas sebagai sesuatu yang objektif. Hal ini relevan dengan karakteristik dari paradigma positivistik yang melihat bahwa ilmu pengetahuan didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur baku (Haryono, 2020). Paradigma positivistik diyakini sebagai sesuatu yang bebas nilai sehingga diperlukan kemampuan untuk memisahkan fakta dan nilai.

Sarantakos (1998) mengkombinasikan logika berpikir deduktif menggunakan kacamata empiris. Hal ini memiliki tujuan untuk memperoleh konfirmasi akan kausalitas yang ditelaah untuk mengkaji pola dari sebuah gejala sosial tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, eksperimen, serta pengukuran kebenaran yang objektif dengan pendekatan yang terstruktur (Ibrahim et al., 2023).

Paradigma ini relevan dengan penelitian penulis yang ingin menganalisis bagaimana implementasi jurnalisme perspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan di media *online* melalui pengamatan empiris dan objektif pada konten berita tersebut untuk melihat apakah pemberitaan sudah mengacu pada etika jurnalisme perspektif gender yang telah ditetapkan secara universal.

1.5.2 *State of The Art*

1.5.2.1 Now you see me, now you don't: applying automated content analysis to track migrant women's salience in German news

Penelitian yang dilakukan oleh Fabienne Lind dan Christine E. Meltzer pada tahun 2020 bertujuan untuk mengeksplorasi representasi media terhadap migran perempuan di Jerman. Menggunakan teknik analisis konten, peneliti tersebut ingin memahami bagaimana media menggambarkan migran perempuan dalam berita. Mereka mengacu pada teori agenda-setting untuk menyelidiki pengaruh liputan media terhadap opini publik, yang menentukan isu dan tokoh yang mendapat sorotan dalam berita untuk membentuk agenda publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran perempuan jarang mendapat perhatian media, dengan persentase liputan antara 12 hingga 26% dari Januari 2003 hingga Desember 2017. Ini menandakan bahwa representasi migran perempuan dalam media relatif rendah yang mungkin memengaruhi keterwakilan dan inklusivitas mereka dalam agenda publik. Temuan ini sejalan dengan teori agenda-setting yang menyoroti peran media dalam membentuk kesadaran publik dan persepsi terhadap isu-isu yang penting.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal subjek dan metode, yaitu penggunaan teknik analisis isi kuantitatif untuk mengevaluasi bagaimana media melaporkan migran perempuan, meskipun dalam penelitian penulis, fokusnya lebih pada buruh migran perempuan. Namun, perbedaan penelitian terletak pada konsep yang digunakan, di mana peneliti ingin menilai sejauh mana media menerapkan konsep jurnalisme perspektif gender dalam liputan buruh migran perempuan.

1.5.2.2 The bits and bytes of gender bias in online news: a quantitative content analysis of the representation of women in Vice.com

Penelitian yang dilakukan oleh Joke D'Heer dan rekan-rekannya pada tahun 2019 bertujuan untuk menganalisis representasi perempuan dalam konten berita yang dipublikasikan di situs web Vice.com. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemahaman pada literatur tentang bias gender di media dengan mengeksplorasi bagaimana perempuan digambarkan dalam berita. Fokus utama penelitian ini adalah pada keterwakilan perempuan sebagai aktor dalam redaksi media, dengan tujuan menjelaskan disparitas dan stereotip gender yang ada dalam industri media massa. Konseptualisasi penelitian ini merujuk pada berbagai teori, termasuk stereotip gender, demokratisasi produksi berita, dan teori representasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs web Vice memberikan keterwakilan perempuan dalam proporsi yang setara dengan laki-laki. Jumlah jurnalis perempuan yang melaporkan berita untuk Vice sedikit lebih banyak daripada media berita tradisional, mencerminkan keseimbangan representasi gender dalam produksi berita.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam mengevaluasi keterwakilan perempuan dalam media online, namun fokus penelitian penulis lebih khusus pada pemberitaan yang sensitif terhadap gender untuk mengatasi disparitas, bias, dan stereotip gender. Namun demikian, penelitian ini tidak membahas keterwakilan jurnalis perempuan dalam ruang redaksi yang juga memiliki korelasi dengan kompleksitas pemberitaan terkait gender.

1.5.2.3 *Turkish Daily Press Framing and Representation of Syrian Women Refugees and Gender-Based Problems: Implications for Social Integration*

Penelitian yang dilakukan oleh Nilüfer Narlı, Mine Özaşçılar, dan Işıl Zeynep Türkan İpek pada tahun 2019 menggunakan analisis framing dan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi representasi media terhadap pengungsi perempuan Suriah di Turki, termasuk cara media membingkai mereka serta isu-isu gender yang ditonjolkan dalam liputan tersebut. Melalui pengamatan terhadap pemberitaan mengenai pengungsi perempuan Suriah di Turki dari media lokal dan nasional antara Januari 2013 hingga Desember 2015, peneliti mengidentifikasi 13 jenis masalah gender yang ditemukan dalam berita tersebut dengan mempertimbangkan enam kerangka utama yang menggambarkan isu-isu gender dari perspektif korban, kriminal, dan ancaman.

Hasil studi menunjukkan bahwa narasi yang menggambarkan perempuan Suriah sebagai risiko atau bahaya cenderung jarang muncul dalam sampel berita yang dianalisis. Namun, ada kemungkinan bahwa narasi semacam itu dapat berkembang di media dan mengarah pada penyalahgunaan citra perempuan sebagai penyebab kekerasan atau ancaman, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integrasi mereka dalam masyarakat. Studi ini juga menyoroti peran penting media dalam menyuarakan perspektif perempuan Suriah yang lebih sensitif terhadap isu gender, sehingga dapat memerangi representasi media yang tidak manusiawi, diskriminatif, dan memperlakukan mereka sebagai korban.

Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal tujuan pemberitaan, yaitu mengeksplorasi bagaimana media meliput perempuan

migran dan menyoroiti isu-isu yang muncul dalam liputan tersebut, namun metode analisis yang digunakan berbeda. Penelitian ini menggunakan analisis framing untuk meneliti bagaimana media membingkai perempuan Suriah dalam liputan mereka.

1.5.2.4 The Gendered Representation of Refugees Using Visual Frames in the Main Western European Media

Penelitian yang diterbitkan oleh Springer Science pada tahun 2020 ini dilakukan oleh Javier J. Amores dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten jurnalistik visual atau fotografi dalam media-media di Eropa terkait bagaimana mereka memberikan pembingkai terhadap pengungsi atau migran perempuan dan apakah perempuan sudah cukup direpresentasikan dalam media-media tersebut. Penelitian ini menggunakan dokumentasi foto jurnalistik yang diterbitkan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam 10 berita digital dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan teori pembingkai visual terhadap sebanyak 500 foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi perempuan digambarkan secara berbeda dengan pengungsi laki-laki. Media-media utama Eropa lebih sering mengasosiasikan perempuan dengan simbol agama dan lebih sering digambarkan sebagai korban. Sementara itu, pengungsi laki-laki lebih sering digambarkan sebagai beban dan ancaman. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa pengungsi laki-laki lebih disuarakan secara aktif oleh media dibandingkan dengan pengungsi perempuan yang disuarakan secara pasif. Mereka pun menyimpulkan bahwa pengungsi perempuan masih belum banyak direpresentasikan di media Eropa. Hal ini disebabkan karena walaupun perempuan mewakili jumlah pengungsi dengan

persentase sebesar 50%, media hanya menggambarkan mereka secara eksklusif di 10% dari seluruh foto mereka. Artinya, laki-laki masih lebih mendominasi media dan dinilai sebagai protagonist narasi media. Para peneliti pun menilai bahwa media barat ingin melakukan pemusnahan simbol terhadap pengungsi perempuan untuk mencegah mereka diterima di masyarakat dan mendapatkan kekuasaan yang setimpal dengan laki-laki.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan penulis dalam hal subjek pemberitaan, yakni migran perempuan. Selain itu, penelitian ini sama-sama melihat tentang bagaimana migran perempuan direpresentasikan dalam media di mana dalam konteks penelitian penulis ialah buruh migran perempuan dalam media *online* di Indonesia. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari segi metode penelitian sebab peneliti menggunakan analisis framing yang akan lebih menganalisis dan mengkritisi tentang pemberitaan terkait migran perempuan di media.

1.5.2.5 Mis/Representations of Women Migrant Workers in The Media: A Critical Analysis

Penelitian yang dilakukan oleh United Nations (UN) Women pada tahun 2017, yang melibatkan penulis Henneberry, Williams, Celis-Parra, dan Daley, bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi kemanusiaan buruh migran perempuan. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif terhadap representasi buruh migran perempuan di surat kabar dari negara-negara pengirim pekerja migran terbesar, menggunakan teknik pengambilan sampel Newbold dkk. Lima surat kabar terkemuka dari masing-masing negara dipilih dengan strategi

purposive sampling yang dipublikasikan selama dua tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana media di negara-negara pengirim buruh migran perempuan merepresentasikan mereka dalam narasi pemberitaan surat kabar.

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga label yang diterapkan pada buruh migran perempuan melalui pemberitaan surat kabar, yaitu sebagai pahlawan yang kuat dan berkontribusi besar bagi keluarga dan komunitas, sebagai ancaman yang terkait dengan kejahatan dan imigrasi ilegal, serta sebagai korban yang termarginalisasi dan minim representasi politiknya. Dari lima media yang diteliti dari berbagai negara, penelitian menunjukkan bahwa buruh migran perempuan lebih sering diidentifikasi sebagai korban, terutama terkait dengan kekerasan dan perdagangan orang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal tujuan menyelidiki representasi media terhadap buruh migran perempuan melalui analisis isi kualitatif, namun berbeda dalam objek penelitian yang difokuskan pada media di Indonesia dan dalam pengelompokan jenis media. Penelitian ini akan digunakan sebagai rujukan karena kesamaan pendekatan analisis framing dan subjek pemberitaan perempuan, buruh migran perempuan, atau buruh migran secara umum. Meskipun demikian, penelitian ini akan menambahkan konsep jurnalisme advokasi selain jurnalisme perspektif gender, serta akan menggunakan teori dan konsep gender seperti teori interseksional dan konsep feminisasi migrasi dengan teori utama konstruksi sosial.

1.5.3 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Teori ini merupakan salah satu teori normatif yang menjelaskan terkait idealisme media dalam beroperasi dengan menerapkan sistem dan nilai-nilai sosial tertentu serta merupakan standar yang harus digunakan masyarakat untuk menilai kinerja media di Amerika Serikat (Barran, 2019).

Teori pers tanggung jawab sosial dimuat dalam pembicaraan mengenai falsafah pers yang terkandung dalam *Four Theories of Press* yang ditulis oleh Siebert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956. Adapun pers tanggung jawab sosial sendiri berkembang setelah adanya *authoritarian theory* dan *libertarian theory*. Setelah pers tanggung jawab sosial, hadir teori keempat bernama *the soviet communist theory* (Kusumaningrat, 2016).

Sebagai modifikasi dari dua teori sebelumnya, teori pers tanggung jawab sosial menitikberatkan pada peran media yang harus terbebas dari kendali pemerintah. Namun, media tetap harus melayani masyarakat dengan menyerukan operasi industri yang bertanggung jawab dan beretika. Di sisi lain, masyarakat tetap perlu mengkritisi dan mengembangkan penilaian yang tegas terhadap media (Barran, 2019).

McQuail dalam Baran (2019) menjabarkan asumsi dari teori pers tanggung jawab sosial yang dibagi ke dalam tujuh poin, yakni:

1. Media memiliki kewajiban untuk menerima dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat.

2. Ada empat standar yang perlu dipenuhi media dalam memenuhi kewajibannya, yakni profesionalisme, kebenaran, ketepatan, dan objektivitas.
3. Media sebaiknya dapat mengatur dirinya sendiri dalam eksistensi kerangka hukum dan lembaga
4. Media perlu menghindari segala sesuatu yang dapat memunculkan kejahatan, kerusakan, ketidaktertiban umum, atau penghinaan terhadap minoritas etnis maupun agama
5. Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan keberagaman masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berbagai perspektif dan hak jawab
6. Masyarakat berhak untuk mengekspektasikan standar tinggi dan intervensi diperbolehkan untuk mengamankan kepentingan umum
7. Media harus akuntabel terhadap masyarakat, para pekerja, dan pasar

Sementara itu, laporan *Commissions on the Freedom of the Press* yang diketuai oleh Robert Hutchins mengajukan lima persyaratan bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdiri dari:

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.
2. Media harus berfungsi sebagai forum pertukaran komentar dan kritik
3. Media perlu memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai masyarakat

5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi dalam rangka mendistribusikan berita dan opini secara luas.

Dari pemaparan di atas, jurnalisme perspektif gender memiliki relevansi dengan beberapa poin asumsi dari teori pers tanggung jawab sosial, yakni:

1. Media memiliki kewajiban untuk menerima dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat.

Jurnalisme perspektif gender berorientasi pada praktik peliputan yang memungkinkan adanya penerapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui narasi pemberitaan yang sensitif terhadap gender sehingga hal tersebut relevan dengan pemenuhan peran media sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

2. Media perlu menghindari segala sesuatu yang dapat memunculkan kejahatan, kerusakan, ketidaktertiban umum, atau penghinaan terhadap minoritas etnis maupun agama

Jurnalisme perspektif gender berfokus untuk menciptakan narasi pemberitaan yang tidak berfokus terhadap kriminalitas, kerusakan, dan penghinaan terhadap semua kaum.

3. Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan keberagaman masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berbagai perspektif dan hak jawab.

Jurnalisme perspektif gender menekankan pada penggunaan unsur-unsur berita, seperti judul, pemilihan kata, perilaku jurnalis yang perlu melanggengkan perspektif gender dalam memproduksi pemberitaan sehingga produk jurnalistik diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana edukasi dan informasi,

1.5.4 Jurnalisme Perspektif Gender

Media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas melalui publikasi isu gender dan minoritas. Dengan demikian, media perlu memiliki pengetahuan dalam memperjuangkan isu gender dan inklusi sosial.

Untuk menjadi media yang lebih inklusif dengan memprioritaskan isu gender dan minoritas, praktik jurnalisme perspektif gender perlu untuk diimplementasikan oleh media setiap kali melakukan pemberitaan terkait dengan hal tersebut.

Jurnalisme perspektif gender adalah praktik jurnalisme yang memperjuangkan kesetaraan gender guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan merata (Dhewy et al., 2024). Dengan demikian, praktik jurnalistik ini diterapkan untuk menciptakan kesetaraan antar seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki, perempuan, minoritas seksual, minoritas agama, kelompok difabel, hingga kelompok adat tertentu.

Praktik tersebut hadir beriringan dengan fakta bahwa posisi perempuan kemudian semakin rentan dan lemah dengan ketidakberpihakan media pada

perempuan. Padahal, media memiliki fungsi penting untuk membentuk persepsi masyarakat melalui proses konstruksi sosial (Vu et al., 2018).

Tak hanya itu, hal tersebut juga hadir sebagai dampak dari banyaknya pemberitaan oleh media yang masih bias gender. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kecenderungan media dalam mengobjektifikasi korban, menonjolkan personalisasi korban sebagai pemicu kekerasan, dan penggunaan diksi yang tidak sensitif gender, seperti diksi diperkosa, ditiduri, dianiaya, dan lainnya. Ada pula sandingan kata terhadap perempuan, seperti gadis muda, gadis lugu, dan gadis janda yang mencerminkan adanya kesan bahwa perempuan ditempatkan pada kondisi tidak berdaya dan dirugikan (Laksono & Zakiyah, 2023).

Jika media tidak mampu menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dan terus melanggengkan stereotip kepada pekerjaan, peran, dan atribut mereka, media hanya akan melanggengkan kesenjangan gender (Zausmer & Flueckiger, 2020). Kesenjangan gender tersebut hingga saat ini masih terlihat dari bagaimana media menampilkan proposisi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki dalam pemberitaan, bagaimana posisi pemberitaan perempuan yang masih ditemukan sebagai objek dibandingkan subjek.

Subono (dalam Sunarto, 2016) melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnalisme sensitif gender dan jurnalisme objektif. Perbedaan ini terdapat pada jurnalisme objektif yang menitikberatkan pada proses dalam melihat fakta yang diatur oleh hukum dan kaidah yang berlaku secara universal. Model jurnalisme ini cenderung menjaga independensi dan keberimbangan dengan

menghindari keberpihakan (Latief & Azis, 2019). Sementara itu, jurnalisme perspektif gender melihat adanya dominasi kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang erat dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan keadilan gender yang kerap dialami perempuan. Subono kemudian mengidentifikasi perbandingan yang cukup signifikan antara jurnalisme objektif dan jurnalisme perspektif gender seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Perbedaan Jurnalisme “Objektif” Gender dan Jurnalisme Berperspektif Gender

FAKTA	
Jurnalisme “Objektif” Gender	Jurnalisme Berperspektif Gender
Terdapat fakta nyata dan ini diatur oleh hukum-hukum/kaidah-kaidah tertentu yang berlaku secara universal	Fakta yang ada merujuk pada realita dunia yang masih menonjolkan adanya ketidaksetaraan gender dan berkaitan dengan dominasi ekonomi-politik dan sosial budaya dalam masyarakat
Berita dianggap sebagai refleksi dari realita sosial yang ada sehingga harus mencerminkan realitas yang diberitakan	Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
POSISI MEDIA	
Media adalah sarana yang mendorong anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan berdiskusi secara bebas, netral, dan setara.	Media menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok marginal sebab media secara objektif dikuasai kepentingan dominan
Media adalah sarana yang menampilkan segala pembicaraan dan kejadian secara apa adanya di kalangan masyarakat	Kelompok marginal mengandalkan media untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
POSISI JURNALIS	
Nilai atau ideologi jurnalis berada di luar proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa	Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa
Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang non-partisan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat	Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan) yang berada dalam masyarakat

Berlandaskan moral (etis)	Berlandaskan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan	Profesionalisme sebagai kontrol
Tujuan peliputan dan penulisan adalah memaparkan dan menjelaskan peristiwa apa adanya	Tujuan peliputan dan penulisan adalah pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok marginal, terutama perempuan
Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran	Jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas-kelas sosial
HASIL PELIPUTAN/PEMBERITAAN	
Hasil liputan bersifat seimbang (dua sisi atau dua pihak) dan cenderung gender netral	Hasil liputan merefleksikan ideologi jurnalis yang berperspektif gender
“Objektif” – netral, tidak memasukkan opini atau pandangan subjektif	“Subjektif” karena merupakan bagian-bagian dari kelompok-kelompok marginal yang diperjuangkan
Memakai bahasa “baku” yang tidak menimbulkan banyak penafsiran	Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas
Hasil peliputan bersifat ekplanasi, prediksi, dan kontrol	Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif, dan pemberdayaan sosial

Realitanya, saat ini media masih menunjukkan pemberitaan yang objektif dan diskriminatif terhadap perempuan. Terlebih, dalam kasus-kasus kekerasan dan kriminal yang melibatkan perempuan, perempuan sering kali diberitakan sebagai pihak yang tidak berdaya melalui penggambaran subordinasi dan marginalisasi yang masih dilanggengkan oleh pemberitaan di media massa kala menulis terkait perempuan (Latief & Azis, 2019).

Zausmer & Flueckiger (2020) mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberitaan yang tidak sensitif gender terhadap perempuan. Adapun hal tersebut terbagi menjadi 8 poin yang terdiri dari:

A. Penekanan Peran

Media sering menekankan peran personal perempuan sebagai istri, ibu, atau pacar dibandingkan CEO, politikus, pengusaha, atau aktivis. Media kerap merujuk pada penggunaan bahasa “*working mom*” atau seorang perempuan pekerja ketika ia menggeluti sebuah profesi bersamaan dengan perannya sebagai seorang ibu. Berbeda dengan bagaimana laki-laki yang tidak pernah dideskripsikan seperti hal tersebut.

B. Kualitas dari karakter yang disorot

Media cenderung menggambarkan perempuan sebagai sosok yang penakut, lemah, emosional, histeris, atau sebagai seorang korban daripada sosok yang percaya diri, kuat, atau penyayang. Media seringkali lebih meletakkan fokusnya pada usia, penampilan, dan pakaian.

C. Penggunaan bahasa

Media mengabadikan stereotip melalui penggunaan bahasa dengan menambahkan gender ke dalam pekerjaan netral, seperti “perawat pria” atau “pengacara wanita”. Hal ini menjadi salah satu bentuk seksisme yang berpotensi paling menjauhkan perempuan dari kesetaraan.

D. Pembuatan referensi yang tidak setara

Hal ini merujuk pada bagaimana laki-laki lebih disandingkan dengan bakat mental atau profesi, sementara perempuan diasosiasikan dengan atribut fisik, mengurangi penyebutan perempuan sebagai seorang istri atau pacar, mengurangi penyebutan “ibu yang bekerja” dan mempertanyakan kapabilitasnya dalam mengurus keluarga.

E. Penggunaan gambar

Media kerap menggunakan foto dari perempuan yang berfokus pada atribut fisik dan pakaian yang sensual.

F. Penggunaan opini dan suara

Media cenderung menggunakan sumber pria lebih banyak dari sumber wanita. Ketika media memilih perempuan sebagai narasumber, mereka hanya menanyakan hal-hal personal, seperti pengalaman pribadi, pendapat, reaksi emosional, atau sebagai saksi. Bukan sebagai juru bicara, perwakilan, atau pakar.

G. Penargetan cerita pada perempuan

Media membuat konten terkait perempuan dengan mendefinisikan masalah perempuan pada ranah selebritas, hiburan, dan kejahatan.

Salah satu hal yang lumrah dilakukan dalam pemberitaan media *online* di Indonesia adalah penggunaan diksi yang tidak tepat dalam memberitakan perempuan. Padahal, hal tersebut dapat melanggengkan praktik pemberitaan yang tidak sensitif gender. Sebab, penggunaan diksi yang tidak tepat kerap mengeksploitasi perempuan, bahkan menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Secara tidak langsung, penggunaan diksi yang tidak tepat dapat terindikasi adanya pelecehan terhadap perempuan.

Berikut adalah tabel terkait daftar diksi yang tidak tepat dan diksi yang disarankan dalam memberitakan terkait perempuan.

Tabel 1.3 Daftar Diksi yang Tidak Tepat dan yang Disarankan dalam Memberitakan Perempuan

Diksi yang Tidak Tepat	Diksi yang Disarankan	Penjelasan
Janda	Single parent, perempuan sudah berpisah	Janda adalah stereotipe yang dilekatkan perempuan dengan konotasi negative di masyarakat
Menggarap, menggauli, bersetubuh, bersanggama	Memperkosa	Kekerasan seksual bukan merupakan aksi heroik
Digagahi	Diperkosa/Rudapaksa	Kejahatan seksual bukan aksi gagah-gagahan
Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus	Kata-kata ini tidak boleh digunakan	Pembaca dapat terpengaruh untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh subjek pemberitaan melalui penggambaran kata-kata tersebut
Payudara diremas, digerayangi,	Kata-kata ini tidak boleh digunakan	Pembaca dapat terpengaruh untuk

Sumber: Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, (2017)

Santi (2007) mengidentifikasi bahwa media massa dalam praktiknya belum mengimplementasikan jurnalisme sensitif gender. Hal ini digambarkan dari beberapa permasalahan dalam media massa bahwa mereka masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, sedikitnya kaum perempuan yang terlibat dalam aktivitas jurnalisme sebagai pekerja media, dominasi kepentingan ekonomi politik yang mendorong pemilik media untuk mengikuti preferensi industri yang dinilai permisif dengan praktik jurnalisme sensitif gender, kode etik jurnalistik, Undang -

Undang Pers, dan regulasi media yang belum menciptakan keadilan terhadap gender. Tak hanya itu, penggunaan bahasa oleh media yang masih seksis dengan penggunaan istilah-istilah yang mensubordinasikan perempuan menunjukkan minimnya sensitivitas gender melalui pengambilan keputusan di media massa.

Dengan demikian, Zausmer & Flueckiger (2020) memaparkan 4 poin utama yang perlu diimplementasikan oleh media dalam rangka mewujudkan praktik jurnalisme berperspektif gender. Adapun poin tersebut meliputi:

A. Menjadikan perempuan sebagai fokus pelaporan

Perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek pemberitaan dengan menjadikannya sebagai karakter utama yang tidak menonjol.

B. Memasukkan suara dan opini perempuan

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penulisan konten
- Melibatkan reporter perempuan untuk meliput cerita yang lebih substantif, seperti politik, bisnis, ekonomi, dan olahraga dibandingkan dengan rubrik gaya hidup dan selebritas.
- Menyertakan sumber perempuan untuk memasukkan perspektif perempuan ke dalam pemberitaan
- Menyertakan ahli perempuan sebagai sumber pemberitaan untuk menciptakan keberimbangan antara proposi ahli laki-laki dan ahli perempuan
- Membuat buku yang memuat sumber ahli perempuan

- Melatih ahli perempuan di media dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi

C. Menghindari stereotip gender dan seksisme

- Menggunakan bahasa dan pemotretan yang adil pada perempuan dengan menggunakan kaidah yang berlaku dan bersifat universal
- Melatih staff di dalam ruang pemberitaan terkait dengan keberimbangan gender serta edukasi terkait bias gender
- Membuat panduan peliputan yang sensitif gender dengan memasukkan panduan bahasa dan penggunaan diksi yang disarankan

D. Melakukan pendekatan yang menarik kepada perempuan

- Melakukan peliputan yang menarik kepada perempuan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan preferensi perempuan
- Mengimplementasikan keberimbangan gender di ruang berita pada posisi pemimpin untuk memberikan kesempatan yang adil, setara, dan inklusif kepada jurnalis perempuan
- Melaksanakan riset audiens

UNESCO (2012) kemudian meluncurkan indikator peliputan yang sensitif gender dalam media untuk mengukur bagaimana operasi konten dan ruang berita dalam institusi media yang sensitif terhadap gender. Dalam konteks penelitian penulis, indikator yang relevan untuk digunakan tertuang dalam kategori konten pemberitaan dengan tujuan objektif untuk melihat bagaimana penggambaran gender yang adil melalui penghapusan stereotip dan promosi

representasi/penggambaran multidimensi serta bagaimana keberimbangan perempuan dan laki-laki sebagai cerminan komposisi masyarakat, pengalaman, tindakan, keprihatinan manusia, dan pandangan dalam liputan media mengenai kejadian yang dialami oleh buruh migran perempuan.

Indikator pertama atau yang dapat disebut sebagai *Strategic Objective 1: Balance presence of Women and Men* dikembangkan dengan melihat beberapa tujuan, seperti menganalisis konten berita dan peristiwa terkini berdasarkan jenis kelamin yang diambil dari arsip media, pemantauan pemberitaan melalui analisis konten yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, dan laporan penilaian dan/atau evaluasi serta kritik terhadap konten berita dan peristiwa terkini oleh pekerja media, termasuk manajer, editor, jurnalis, dan pekerja lainnya.

Tujuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang ingin melihat bagaimana media memberitakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemberitaan menyangkut isu gender atau jenis kelamin dengan melihat bagaimana media membentuk narasi pemberitaan mengenai buruh migran perempuan. Hal tersebut akan dilihat menggunakan teknik analisis isi konten pemberitaan yang nantinya akan menjadi kritik serta evaluasi dalam hal pengimplementasian jurnalisme perspektif gender di media *online*.

Selain itu, peneliti juga meninjau indikator lain dengan objektif strategis lain yang disebut sebagai *Strategic Objective 2: Fair Portrayal of Women and Men through elimination of stereotypes and promotion of multi-dimensional representation/portrayal*. Adapun indikator ini dikembangkan dengan tujuan yang

hampir serupa dengan poin-poin pada tujuan objektif strategis 1. Namun, terdapat satu poin yang menjadi perbedaan. Dalam objektif strategis 2, indikator-indikator yang disajikan juga ingin melihat bagaimana media mengaplikasikan aturan inversi atau pembalikan peran untuk mendekonstruksikan makna dari stereotip gender.

Istilah pembalikan peran sendiri pertama kali dideskripsikan oleh seorang filosofis bernama J. L. Moreno, walaupun pada saat itu, terminologi “pembalikan peran” sendiri belum diciptakan. Kemudian, istilah tersebut dikembangkan oleh Moreno dan George Herbert Mead dengan mendefinisikan pembalikan peran sebagai pengambilan peran orang lain dengan mengalami apa yang dialami oleh orang lain seutuhnya dari diri sendiri (Sabelli, 1989).

Dalam konteks jurnalisme perspektif gender, penerapan pembalikan peran adalah cara untuk menantang stereotip dengan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan perspektif alternatif dan mempertanyakan asumsi yang mendasari stereotip antara perempuan dan laki-laki. Pembalikan peran sendiri melibatkan proses imajinasi sebuah skenario di mana peran atau atribut individu atau kelompok dibalik, sering kali untuk menyoroti absurditas atau ketidakadilan dari stereotip aslinya melalui penonjolan pemberitaan pada perempuan yang memegang peran ‘tidak biasa’ sebagai perempuan. Misalnya, jika ada stereotip yang menyatakan bahwa laki-laki lebih cocok untuk peran kepemimpinan dibandingkan perempuan, menerapkan aturan inversi mungkin melibatkan membayangkan sebuah masyarakat di mana perempuan memegang semua posisi kepemimpinan dan laki-laki diasumsikan kurang mampu dalam peran tersebut.

Tabel 1.4 Indikator Jurnalisme Perspektif Gender di Media

<i>Strategic Objective 1: Balance presence of Women and Men</i>	<i>Strategic Objective 2: Fair Portrayal of Women and Men through elimination of stereotypes and promotion of multi-dimensional representation/portrayal</i>
<p>1. Proporsi perempuan dan laki-laki yang dilihat, didengar atau dibaca dalam berita & peristiwa terkini konten (tidak termasuk gambar) selama pilihan acak selama satu minggu.</p> <p>2. Proporsi perempuan dan laki-laki yang diwawancarai/dikutip langsung dalam berita dan peristiwa terkini konten sebagai sumber informasi dan/atau opini.</p> <p>3. Proporsi perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan yang berperan sebagai 1) Juru Bicara; 2) Para ahli; dan 3) Warga/vox</p> <p>4. Proporsi orientasi eksternal atau kemasyarakatan perempuan dan laki-laki yang dilihat, didengar atau dibaca tentang konten berita & kejadian terkini termasuk gambar (misalnya terkait pekerjaan, bukan berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan hubungan, bukan berhubungan dengan hubungan keluarga).</p> <p>5. <i>Proporsi perempuan dan laki-laki yang dilihat, didengar atau dibaca dalam berita & peristiwa terkini konten dipilah menurut status sosial (misalnya kaya, kelas pekerja, politik elit, miskin dan pedesaan).</i></p> <p>6. Persentase berita yang fokus secara terpusat/khusus pada perempuan dan/atau isu-isu khusus</p>	<p>1. Proporsi cerita yang mengandung stereotip (interpretasi seksis secara terbuka terhadap karakteristiknya dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat).</p> <p>2. Proporsi cerita yang mengandung stereotip (penggambaran “feminin”/ “maskulin” tradisional karakteristik dan peran laki-laki/perempuan, sehingga menjadikannya tampak normal dan tak terelakkan sambil mengecualikan kemungkinan sifat dan fungsi lain bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat).</p> <p>3. Proporsi perempuan dibandingkan laki-laki yang digambarkan sebagai korban (misalnya kejahatan, kekerasan/kekejaman, konflik, bencana, kemiskinan, dll).</p> <p>4. Proporsi perempuan dibandingkan laki-laki yang digambarkan sebagai penyintas (yaitu, dengan bukti adanya agen aktif meskipun terdapat pengalaman/keadaan buruk seperti kejahatan, kekerasan/kekejaman, konflik, bencana, kemiskinan, dll).</p> <p>5. Persentase cerita yang memuat representasi/penggambaran multidimensi tentang laki-laki dan perempuan (menunjukkan upaya jurnalistik untuk menantang/melawan stereotip berbasis gender).</p> <p>6. Persentase berita yang mengandung bahasa seksis yang digunakan oleh reporter atau lembaga penyiaran tidak termasuk dalam hal kutipan langsung dari suatu sumber (yaitu, indikasi bias, diskriminasi atau stereotip berdasarkan jenis kelamin atau</p>

<p>relevansi/kepedulian terhadap perempuan dalam konten berita & isu terkini (misalnya berbasis gender kekerasan, hak-hak perempuan, prestasi perempuan, dll.).</p> <p>7. Proporsi waktu/ruang dan keunggulan (sehubungan dengan jam tayang utama atau jam sibuk, depan halaman atau <i>feature story</i>) diberikan pada cerita yang menampilkan perempuan sebagai sumber informasi/pendapat dan/atau berfokus secara terpusat pada perempuan atau isu-isu yang memiliki relevansi/kekhawatiran khusus terhadap perempuan konten berita & kejadian terkini</p>	<p>peran gender).</p>
---	-----------------------

Sumber: Gender-Sensitive Indicators for Media (UNESCO, 2012).

Melalui indikator yang telah ditetapkan, penulis berupaya untuk melihat apakah media online telah melakukan pemberitaan yang berperspektif terhadap gender, khususnya dalam konteks pemberitaan buruh migran perempuan.

1.5.5 Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik pada dasarnya menjadi hal yang terintegrasi dengan praktik jurnalistik. Sejatinya, insan pers perlu mengedepankan masalah etis dalam kesehariannya melakukan produksi pemberitaan. Prinsip dasar etika sendiri dapat dipahami melalui dua cara, yakni etika filosofis dan etika terapan (Ward, 2011).

Etika filosofis sendiri menitikberatkan pada konsep etika itu sendiri yang meliputi makna, tujuan, konsep, batas, dan sejarah. Sementara itu, etika terapan

terbagi menjadi teori normatif yang berfokus pada prinsip dan nilai serta kerangka etika yang berfokus pada kode etik yang berpengaruh pada kehidupan luas.

Dalam konteks jurnalistik, etika menjadi suatu pondasi yang penting bagi insan pers untuk berkomitmen dalam melakukan sesuatu yang baik dalam batasan etika yang telah disepakati secara universal. Dari hal tersebut, eksistensi kode etik jurnalistik menjadi hal signifikan yang ada untuk menjadi panduan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik pada dasarnya perlu ditaati oleh jurnalis sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik guna menegakkan integritas serta profesionalisme (Dewan Pers, 2013).

Kode etik jurnalistik sendiri mengandung 11 pasal yang bersifat universal untuk setiap jurnalis di Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006.

Dalam konteks pemberitaan buruh migran perempuan, kode etik yang memiliki relevansi yang signifikan adalah kode etik pada pasal 4, 5, dan 8. yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- A. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Dewan pers (2013) mengidentifikasi pelanggaran pasal 4 pada beberapa butir, seperti bohong yang merujuk pada hal yang tidak sesuai fakta, fitnah yang berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan sengaja dengan niat buruk, sadis merujuk pada kejam dan tidak mengenal belas kasihan, cabul yang berarti penggambaran tingkah laku melalui foto, gambar, grafis, dan tulisan

yang bersifat erotis, serta pengharusan jurnalis untuk menyertakan waktu pengambilan gambar dan suara sebagai arsip. Pasal ini memiliki relevansi dengan jurnalisme perspektif gender dimana dalam salah satu indikator yang dituangkan pada *A Gender Balance Guide for Media* dari *Women in News* (2020) terkait dengan foto, grafis, dan penggunaan bahasa yang baik untuk liputan yang sensitif terhadap keberimbangan gender. Dalam konteks penggunaan visual, seperti foto dan infografis, laporan tersebut menyarankan agar media tidak menggunakan bahasa atau foto yang menurunkan derajat perempuan dengan penggunaan objek seksual atau stereotip ekstrim serta penggunaan foto yang menampakkan fitur dari tubuh perempuan, seperti belahan dada, selulit, dan keriput.

- B. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dewan pers mengidentifikasi identitas sebagai segala bentuk informasi yang menyangkut diri seseorang dan memberikan kemudahan bagi orang lain untuk melacak. Hal ini menjadi sesuatu yang rentan dilanggar oleh media, terlihat dari bagaimana hal ini masih menjadi hal yang kerap dijumpai dalam praktik media pada berbagai bentuk eksposur identitas korban kejahatan susila oleh media massa (Mony & Megawati, 2021). Adapun identitas yang kerap diekspos ialah domisili, pekerjaan, foto atau gambar diri orang terdekat maupun gambar korban itu sendiri. Dengan

demikian, tugas wartawan untuk melindungi identitas korban masih dinilai luput.

- C. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

A Gender Balance Guide for Media dari *Women in News* (2020) memaparkan bahwa penggunaan dan bahasa yang adil dan pemetretan yang adil menjadi salah satu rujukan, seperti menghindari penggunaan bahasa yang mengecualikan perempuan, berbau seksisme, menimbulkan diskriminasi, hingga stereotip. Hal ini perlu diperhatikan dari pemilihan diksi kata, bahasa, penempatan proporsi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam hal subjek pemberitaan, serta pemosisian perempuan yang setara dengan laki-laki untuk menimbulkan adanya prasangka dan diskriminasi yang dilanggengkan oleh masyarakat.

1.5.6 Media Online

Dewasa ini, dunia jurnalisme melakukan penyebaran berita melalui apa yang dinamakan sebagai media lama (*old media*) dan media baru (*new media*) atau yang biasa disebut dengan media *online*. Media baru sendiri merujuk pada sebuah teknologi yang menghubungkan media teknologi digital melalui sistem komputerisasi yang terkoneksi dengan jaringan (Nur, 2021).

Hal ini sejalan dengan media *online* yang mengimplementasikan penyaluran informasi menggunakan akses perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet melalui sajian di situs web internet (Kompas, 2021). Adapun media *online* sendiri dapat berupa berbagai bentuk format media, seperti teks, foto, video, atau suara.

Gushevinalti, Suminar, & Sunaryanto (2020) mengidentifikasi perbedaan antara media baru dan media tradisional ke dalam beberapa kategori, seperti:

1. Kapasitas luas yang memuat penyimpanan data di server komputer dan sistem global
2. Fleksibilitas pemuatan berita dan editing
3. Fleksibilitas jadwal terbit
4. Kecepatan, kejadian dan peristiwa yang diliput oleh jurnalis di lapangan dapat langsung *ter-upload* di media tanpa harus menunggu lama.
5. Lebih aksesibel ke seluruh belahan dunia yang terakses dengan internet
6. Aktual karena memungkinkan kemudahan dan kecepatan
7. *Update*, memungkinkan adanya pembaruan informasi secara terus-menerus
8. Interaktif atau dua arah
9. Terarsip di bank data dan dapat ditemukan melalui link
10. Terhubung dengan sumber lain atau *hyperlink* pada informasi yang berkaitan satu sama lain.

1.5.7 Implementasi Jurnalisme Perspektif Gender pada Media *Online*

Mengacu pada Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, media memiliki kebebasan sendiri dalam cara kerjanya, termasuk ke dalam pengaturan dan pengontrolan yang bebas dilakukan oleh media itu sendiri. Adapun kebebasan tersebut sering kali dituangkan melalui pemilahan isu serta penekanan isu tertentu yang nantinya dapat dikembangkan dan dieksplorasi sendiri oleh masyarakat. Berdasarkan lima prasyarat yang dikembangkan oleh Hutchins Commission terkait dengan syarat pers bertanggung jawab, media perlu mengembangkan isu-isu tersebut melalui penyajian berita-berita yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas. Dengan demikian, implementasi jurnalisme perspektif gender perlu untuk digalakkan dalam setiap praktik peliputan di media demi mencapai prasyarat pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Penerapan jurnalisme perspektif gender yang signifikan dapat menciptakan iklim yang adil baik bagi laki-laki, maupun perempuan. Terlebih, dalam konteks buruh migran perempuan, penerapan jurnalisme perspektif gender akan dapat membawa perspektif publik ke dalam lanskap yang lebih luas terkait dengan kompleksitas permasalahan buruh migran perempuan melalui peliputan yang lebih memperhatikan posisi perempuan sebagai buruh.

Secara umum, media *online* masih memiliki beberapa catatan dalam menerapkan jurnalisme perspektif gender. Berdasarkan hasil laporan Remotivi terkait Indeks Inklusivitas Media (2020), pemberitaan terkait perempuan dalam kekerasan baik secara fisik maupun simbolik mendapatkan perhatian paling tinggi di media dengan setiap media memiliki jumlah pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak. Dari seluruh berita, sebesar 70,5% berita

ditulis dengan konteks peristiwa konflik. Sementara, dalam klaster lain, seperti disabilitas, gender, dan sebagainya, peristiwa konflik ‘hanya’ sebesar 47,9%. Dari segi komposisi narasumber, peliputan narasumber non-marginal masih mendominasi dengan persentase sebesar 84,3%.

Salah satu indikator jurnalisme perspektif gender menyatakan bahwa proporsi narasumber perempuan atau marginal seharusnya lebih mendominasi daripada narasumber lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa media *online* belum memenuhi salah satu indikator jurnalisme perspektif gender pada pemberitaan terkait kekerasan pada perempuan secara umum.

Untuk segi indikator lain, seperti judul, topik, posisi perempuan, proporsi narasumber, dan penggunaan bahasa akan ditinjau lebih dalam pada konteks pemberitaan buruh migran perempuan untuk melihat apakah media *online* sudah mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender pada praktiknya sehari-hari.

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki hipotesis bahwa artikel berita yang diterbitkan oleh media *online* terkait dengan buruh migran perempuan belum sepenuhnya mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender.

1.7 Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian akan membahas 4 hal terkait dengan proporsi pemberitaan yang terbagi menjadi:

1.7.1 Proporsi diksi sensasional pada judul berita

Diksi sensasional pada judul berita dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Judul mengandung unsur personalisme
- b. Judul mengandung unsur emosionalisme
- c. Judul mengandung unsur stereotip
- d. Judul mengandung unsur provokatif/*clickbait*

1.7.2 Proposi tubuh berita yang telah memenuhi kode etik jurnalistik

Tubuh berita yang telah memenuhi kode etik jurnalistik dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tubuh berita memuat kesesuaian judul dan isi
- b. Tubuh berita tidak menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan unsur SARA
- c. Tubuh berita tidak menyinggung hal-hal pribadi buruh migran Perempuan dengan menyebutkan masa lalu buruh migran Perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan
- d. Tubuh berita tidak menyinggung status pernikahan buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan
- e. Tubuh berita tidak menyinggung status sosial buruh migran Perempuan
- f. Tubuh berita tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan atribut fisik buruh migran Perempuan

- g. Tubuh berita tidak membingkai buruh migran Perempuan sebagai ancaman
- h. Tubuh berita tidak memuat foto yang menunjukkan atribut fisik buruh migran Perempuan
- i. Tubuh berita tidak menyebutkan informasi pribadi buruh migran Perempuan
- j. Tubuh berita tidak menyebutkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan

1.7.3 Proporsi penggunaan diksi pada tubuh berita

Diksi pada tubuh berita yang telah memenuhi kaidah jurnalisme perspektif gender dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Diksi pada tubuh berita mengandung unsur stereotip
- b. Diksi pada tubuh berita mengandung unsur labelisasi
- c. Diksi pada tubuh berita tidak mengandung unsur stereotip maupun labelisasi

1.7.4 Proporsi narasumber perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan

Proporsi narasumber perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pemberitaan memuat kutipan dari buruh migran perempuan sebagai Korban
- b. Pemberitaan memuat kutipan dari buruh migran perempuan sebagai pelaku

- c. Pemberitaan memuat kutipan dari pihak aparat dan lembaga penegak Hukum & HAM Perempuan
- d. Pemberitaan memuat kutipan dari pihak aparat dan lembaga penegak Hukum & HAM Laki-Laki
- e. Pemberitaan memuat kutipan dari aktivis perempuan
- f. Pemberitaan memuat kutipan dari aktivis laki-laki
- g. Pemberitaan memuat kutipan dari pihak lainnya berjenis kelamin perempuan
- h. Pemberitaan memuat kutipan dari pihak lainnya berjenis kelamin laki-laki

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Adapun analisis isi kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari pesan untuk mengeksplorasi kesimpulan mengapa pesan itu dibentuk (Eriyanto, 2011).

Holsti (1989) membagi fokus metode analisis ke dalam tiga bagian yang terdiri dari: (1) menggambarkan karakteristik pesan, (2) membuat kesimpulan penyebab dari suatu pesan, (3) menarik kesimpulan mengenai efek komunikasi. Dalam hal ini, fokus yang menjadi relevansi penelitian penulis adalah pada nomor 1 dan 2.

Dengan menggunakan metode analisis isi, peneliti dapat mengidentifikasi serta mempelajari gambaran isi, karakteristik, pesan, dan tren dari suatu isi yang dilakukan secara objektif, dapat direplikasi, valid dan reliabel (Eriyanto, 2011). Berangkat dari hal tersebut, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk persentase yang menggambarkan bagaimana penerapan jurnalisme berperspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan untuk meninjau dan menggambarkan kesesuaian penerapan praktik jurnalisme berperspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan di media *online* Indonesia

1.8.2 Populasi dan Sampel

1.8.2.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah artikel terkait buruh migran perempuan dari 4 media *online* di Indonesia yang paling banyak diakses menurut Similarweb pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 sebanyak 126 artikel. Adapun media-media tersebut terdiri dari Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, dan CNN dengan mencari artikel menggunakan kata kunci “buruh migran perempuan”, “tenaga kerja perempuan”, dan “pekerja migran perempuan”.

1.8.2.2 Sampel

Sampel dari penelitian ini berjumlah 63 artikel.

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *systematic random sampling*. Eriyanto (2011) menjabarkan teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengacu pada urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Artikel-artikel

terkait buruh migran perempuan dari 4 media *online* diberikan nomor urut dari 1-126 sehingga artikel yang menjadi sampel adalah yang diberi nomor urut genap. Selanjutnya, peneliti dan satu orang *coder* memberikan *coding* kepada sampel pemberitaan sesuai dengan pedoman *coding sheet* yang ada.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data deskriptif dengan sumber data sebagai berikut:

1.8.4.1 Jenis Data

Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil analisis bersumber lembar koding.

1.8.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari artikel pemberitaan terkait buruh migran perempuan pada lima media *online* di Indonesia yang dimuat pada 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur buku, jurnal, penelitian terdahulu, data-data pendukung, serta artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis terkait bingkai pemberitaan buruh migran perempuan.

1.8.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala data nominal yang ditandai dengan “ya”, “tidak”, atau “ragu-ragu” dengan memuat “1” atau “0” pada lembar koding.

1.8.6 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Adapun penelitian ini akan menggunakan proses koding yang akan dilakukan oleh peneliti dan koder. Artikel pertama-tama akan dikumpulkan dan didokumentasikan sebelum kemudian dimasukkan pada lembar koding atau *coding sheet*. Setiap artikel yang memuat indikator jurnalisme perspektif gender akan diberikan kode “1” pada setiap indikator. Sementara itu, artikel yang tidak memuat indikator yang telah ditetapkan akan diberikan kode “0”.

Setelah dua koder memberikan kode pada lembar koding, langkah selanjutnya ialah penghitungan frekuensi masing-masing kategori dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi

N: Jumlah Sampel

1.8.7 Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data penelitian, penulis akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas akan dilakukan antara peneliti dan dua orang koder dengan cara memberikan masing-masing koder lembar koding untuk melihat perbedaan dan persamaan hasil koding. Kemudian, uji reliabilitas antar koder (*intercoder reliability*) dilakukan.

Peneliti menetapkan angka reliabilitas pada 0,8 atau 80% yang artinya jika hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan angka di atas 0,8, alat ukur teridentifikasi reliabel.

Holsti menetapkan formula reliabilitas antar koder dengan rumus:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR: Koefisien Reliabilitas

M: Kesepakatan Koder

N: Jumlah yang diteliti

1.8.8 Kategorisasi Penelitian

Tabel 1.5 Kategorisasi Penelitian

Unit Analisis	Penjelasan
Topik Berita	
<p>Topik Berita</p> <p>1 = Kekerasan Fisik</p> <p>2 = Kekerasan Seksual</p> <p>3 = Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>4= Upah tidak dibayar</p> <p>5= Perlakuan tidak manusiawi</p> <p>6= Prosedur pemberangkatan ilegal</p> <p>7= Kebijakan negara asal/negara tujuan</p> <p>8= Lainnya</p>	<p>Komnas Perempuan (2019) memaparkan sejumlah situasi faktual terkait buruh migran perempuan yang rentan mengalami tindakan tidak menyenangkan dari pra keberangkatan hingga kepulangan yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual dan kekerasan fisik, TPPO, upah yang tidak dibayar, perlakuan tidak manusiawi (Contoh: buruh migran perempuan yang tidak mendapatkan makan dan minum, fasilitas, dan tempat tinggal layak), hingga prosedur pemberangkatan yang ilegal. Selain itu, hal terkait kebijakan negara pengirim atau negara tujuan juga sering kali diangkat dalam pemberitaan yang dapat terdiri dari peraturan atau kebijakan yang mengatur keberangkatan hingga kepulangan buruh migran perempuan.</p>
Judul Berita	
<p>Apakah judul berita memuat unsur personalisme</p> <p>1= Tidak</p> <p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	<p>Judul berita termasuk ke dalam kategori yang memuat unsur personalisasi apabila berita menekankan aspek personalisasi melalui penyebutan status ekonomi, seperti <i>kaya, miskin, jelata, kelas bawah</i>, status pernikahan seperti <i>janda dan duda, menyebutkan suami atau istri dari pekerja migran</i>, serta penyebutan unsur SARA.</p> <p>Contoh: “Suami TKW Cianjur yang Dijadikan PSK di Dubai Apresiasi Respons Cepat Polisi” atau “Derita TKI Indonesia: Berangkat Miskin, Pulang Miskin”</p>

<p>Apakah judul berita memuat unsur emosionalisme</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Judul berita termasuk ke dalam kategori yang memuat unsur emosionalisme adalah apabila berita menggunakan judul yang menekankan unsur emosional dengan tujuan menggugah simpati para pembaca melalui penggunaan kata “<i>tragis</i>”, “<i>pilu</i>”, “<i>mengerikan</i>”, “<i>menyedihkan</i>”, “<i>tega</i>”, “<i>biadab</i>”, “<i>keterlaluan</i>”, dan sebagainya.</p>
<p>Apakah judul berita memuat unsur stereotip</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Judul berita termasuk ke dalam kategori yang memuat unsur stereotip apabila berita menggunakan judul yang menekankan prasangka atau generalisasi yang tidak adil, seperti penggunaan judul dengan kata-kata “<i>rentan terjerumus</i>”, “<i>rentan terkena</i>”, “<i>rentan menjadi korban</i>”, “<i>rentan kekerasan</i>”, “<i>gadis desa</i>”, “<i>wanita lemah</i>”, “<i>migran ilegal</i>”, “<i>migran gelap</i>”, dan sebagainya.</p>
<p>Apakah judul berita memuat unsur provokatif/clickbait</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Judul berita termasuk ke dalam dalam kategori yang memuat unsur provokatif/clickbait apabila berita memiliki jumlah rata-rata kata sebanyak 10 kata dengan menggunakan diksi, seperti “<i>wow</i>”, “<i>astaga</i>”. “<i>ternyata</i>”, “<i>yuk</i>”, “<i>mengejutkan</i>” disertai dengan penggunaan tanda baca “<i>!</i>” atau “<i>?</i>” dalam rangka mengeksploitasi celah keingintahuan pembaca serta tidak memiliki kesesuaian antara judul dan isi.</p>
Tubuh Berita	
<p>Apakah berita memuat kesesuaian judul dan isi?</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Mengacu pada kode etik jurnalistik pasal 1 yang menyinggung bahwa jurnalis perlu menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Luputnya jurnalis pada ketiga hal tersebut dapat berindikasi pada ketidaksesuaian judul dan isi berita yang tidak akurat sehingga menyesatkan pembaca dengan praktik pembuatan judul yang mengedepankan sensasionalisme.</p>
<p>Apakah isi berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan SARA?</p> <p>1= Tidak</p>	<p>Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dalam bentuk penyebutan SARA apabila berita menuliskan informasi berupa suku, agama, dan ras dari buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan.</p>

2= Ragu-Ragu 3= Ya	
Apakah isi berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyinggung masa lalu buruh migran perempuan? 1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya	Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dalam bentuk menceritakan masa lalu yang bersifat personalisasi apabila berita menceritakan pengalaman masa lalu buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan, seperti profesi sebelumnya atau kisah masa lalu keluarga yang tidak relevan dengan pemberitaan.
Apakah isi berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan status pernikahan buruh migran perempuan? 1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya	Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dalam bentuk penyebutan status pernikahan apabila dalam isi berita terdapat penulisan diksi “janda”, “bercerai”, “istri dari ...”, atau “suami dari...”.
Apakah isi berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyebutkan status sosial buruh migran perempuan? 1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya	Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dalam bentuk penyebutan status atau kasta sosial buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan apabila isi berita memuat diksi, seperti miskin, jelata, kelas bawah, dan sebagainya.
Apakah berita menyebutkan hal-hal yang berkaitan	Berita menyinggung atribut fisik buruh migran perempuan apabila isi berita mendeskripsikan bentuk

<p>dengan atribut fisik buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak</p> <p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	<p>wajah, bentuk tubuh, warna kulit, ukuran badan, serta gaya berpakaian dari buruh migran perempuan.</p>
<p>Apakah berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman?</p> <p>1= Tidak</p> <p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	<p>Berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman apabila berita menekankan adanya potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh buruh migran perempuan dengan pemberitaan bernada negatif. Adapun berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman apabila berita menekankan buruh migran perempuan sebagai pencuri lapangan kerja, penguras perekonomian, pengancam sistem imigrasi, pengancam keamanan masyarakat, pengancam kesehatan masyarakat, ancaman karena seksualitas, ancaman karena berasal dari luar negeri, serta ancaman karena ras.</p>
<p>Apakah berita memuat foto yang menunjukkan atribut fisik buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak</p> <p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	<p>Berita memuat foto yang menunjukkan atribut fisik buruh migran perempuan apabila terdapat foto yang menunjukkan wajah tanpa disensor, foto yang bernuansa sensual, atau foto berupa luka fisik yang tidak disensor.</p>
<p>Apakah berita menyebutkan informasi pribadi buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak</p> <p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	<p>Berita mencantumkan data pribadi buruh migran perempuan apabila menuliskan alamat, nama lengkap, tempat tinggal, alamat bekerja, hingga media sosial buruh migran perempuan.</p>

<p>Apakah berita menyebutkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Berita mencantumkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan apabila berita menuliskan nama lengkap, tempat tinggal, alamat bekerja, hingga media sosial keluarga dan kerabat buruh migran perempuan.</p>
Penggunaan Diksi	
<p>Apakah berita memuat diksi yang mengandung stereotip terhadap buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Pemberitaan memuat diksi yang mengandung stereotip apabila terdapat penggunaan diksi stereotip meliputi , <i>“ibu muda”, “gadis”, “cantik”, “janda”, “TKW ilegal”, “buruh migran ilegal”, “dijual”, “diperdagangkan”, “disiksa”</i> dan sebagainya.</p>
<p>Apakah berita memuat diksi yang mengandung labelisasi terhadap buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak 2= Ragu-Ragu 3= Ya</p>	<p>Pemberitaan memuat diksi yang mengandung labelisasi apabila terdapat penggunaan diksi labelisasi yang meliputi <i>“...hanya dari lulusan sekolah dasar”, “seorang gadis muda menawarkan layanan seksual seharga Rp500.000/jam”, “pembawa virus”, “mengancam keamanan”, “suka menikah dengan orang luar negeri”, “bodoh dan bisa diperdaya”</i></p>
<p>Apakah berita memuat diksi yang netral terhadap buruh migran perempuan?</p> <p>1= Tidak</p>	<p>Ketika sebuah berita tidak menyertakan diksi yang mengandung stereotip, labelisasi, dan diskriminasi, maka berita tersebut dapat dikatakan telah menerapkan penggunaan diksi yang netral terhadap gender.</p>

<p>2= Ragu-Ragu</p> <p>3= Ya</p>	
Narasumber	
<p>Narasumber Berita</p> <p>1= Buruh Migran Perempuan sebagai Korban</p> <p>2= Buruh Migran Perempuan sebagai Pelaku</p> <p>3= Pihak Aparat dan Lembaga Penegak Hukum & HAM Perempuan</p> <p>4= Pihak Aparat dan Lembaga Penegak Hukum & HAM Laki-Laki</p> <p>5= Aktivis Perempuan</p> <p>6= Aktivis Laki-Laki</p> <p>7= Lainnya, Perempuan</p> <p>8= Lainnya, Laki-Laki</p>	<p>Unit analisis narasumber berita mengacu pada identifikasi dan evaluasi narasumber yang disebutkan dalam sebuah berita sebagai representasi dari sebuah isu pemberitaan. Adapun pengelompokan narasumber akan dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Korban Korban dapat dikatakan sebagai orang atau buruh migran perempuan yang mengalami segala kasus tidak menyenangkan dalam berbagai isu yang telah ditentukan, seperti perdagangan orang, penipuan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan lainnya. b. Pelaku Pelaku adalah orang yang melakukan segala tindakan tidak menyenangkan yang dialami oleh buruh migran perempuan. Dalam hal ini, pelaku dapat berupa pemberi kerja atau sindikat penyalur kerja ilegal. c. Aparat dan Lembaga Penegak Hukum & HAM Adapun yang termasuk ke dalam kategori ini adalah polisi, jaksa, hakim, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Bantuan Hukum. d. Aktivis Aktivis dapat dikatakan sebagai individu atau sekelompok orang yang menyebarkan pemahaman akan isu-isu tertentu serta menuntut adanya perubahan sosial, politik, lingkungan, atau budaya yang dianggap penting atau mendesak. Dalam konteks buruh migran perempuan, narasumber yang diidentifikasi

	<p>sebagai aktivis dapat direpresentasikan dari komunitas, seperti JALA PRT atau SBMI.</p> <p>e. Lainnya Lainnya dapat mencakup orang atau kelompok di luar aparat dan lembaga penegak hukum dan HAM yang dapat meliputi masyarakat, kerabat, keluarga, teman, peneliti, psikolog, atau lembaga kemasyarakatan sosial.</p>
--	--